

































IPNU-IPPNU Plumpang saat itu. Sehingga dengan adanya sumbangan dari masyarakat tersebut sangat membantu, karena program kerja akan terus terlaksana ketika tersedianya dana. Misalnya mengadakan pengajian, memperingati hari besar, dan kerja bakti. Dimana program kerja tersebut masih melibatkan masyarakat, tanpa melibatkan masyarakat program kerja tersebut tidak akan berjalan.

Sedangkan yang menjadi hambatan terhadap berjalannya program kerja, antara lain adalah:

- a. I'annah syahriyah (iuran bulanan) yang kurang tertib.
- b. Sarana jalan di desa-desa yang masih berupa tanah dan bebatuan (belum dibangun) sehingga saat hujan jalanan menjadi becek, dan alat transportasi yang masih menggunakan sepeda onthel. Menjadi hambatan karena dapat menyebabkan kesulitan dalam perjalanan silaturahmi.
- c. Sarana komunikasi yang masih manual, belum ada alat komunikasi modern seperti *Handphone* dan media komunikasi lainnya di daerah Plumpang saat itu. Jadi yang dijadikan kekuatan dalam berkomunikasi hanyalah melalui silaturahmi dari ranting ke ranting lainnya. Sulitnya sarana komunikasi ini merupakan hambatan yang besar menurut mereka dalam berorganisasi sosial, apalagi jarak antara ranting satu ke ranting yang lain sangat berjauhan, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bersatu dalam













Dengan adanya penerapan Pancasila sebagai asas tunggal dalam organisasi, IPNU-IPPNU dapat diterima di semua kalangan, *pertama* oleh pemerintah, karena kalau menengok ke belakang, NU dulu dianggap sebagai organisasi yang menentang Pancasila dengan azas Islam. Mulai tahun 1993, sebagian anggota IPNU-IPPNU sudah diizinkan masuk ke dalam struktur pemerintahan, baik Perangkat Desa maupun Mariner. Kemudian pemerintah sering mengundang IPNU-IPPNU Plumpang, guna sebagai penyambung lidah antara pemerintah dengan Ormas. *Kedua*, oleh partai politik, sebelumnya Suparji pernah menjadi pengurus partai Golkar di Sopsi yaitu sebuah lembaga di bawah pembinaan Golkar. Setelah Suparji menjadi ketua PAC IPNU di Plumpang, beliau direkrut kepada kepengurusan organisasi kemasyarakatan ANTI (organisasi milik Golkar), selaku beliau sebagai ketua IPNU. *Ketiga*, oleh semua pelajar baik dari kalangan pesantren maupun kalangan umum.

## **2. Kerjasama dengan pemerintah**

Dalam hal ini yang dimaksud “kerjasama dengan pemerintah” adalah berupa pembinaan-pembinaan yang diberikan pemerintah kepada IPNU-IPPNU, antara lain:

- a. Pembinaan sosial dan politik dari Kasospol (Kepala Sosial Politik).
- b. Pembinaan dari pemerintah daerah baik desa maupun kecamatan.

c. Bantuan langsung, diberikan kebebasan menggunakan fasilitas Negara dalam setiap mengadakan kegiatan organisasi. Misalnya, menggunakan kantor balai desa maupun gedung serba guna. Karena sebelumnya IPNU-IPPNU masih bergerak hanya dilingkup sektoral, seperti Madrasah, Pondok Pesantren, dan Mushola. Masjid pun masih belum diperbolehkan, karena Masjid dianggap sebagai tempat umum.

Setelah adanya program baru, semua serba dirubah, semua kegiatan di lembaga-lembaga birokrasi sudah terlaksanakan. Pada tahun 1993 juga mulai bekerjasama dengan cabang dengan meyakinkan kepada pemerintah bahwa IPNU-IPPNU merupakan organisasi independen dan bukan organisasi yang pro terhadap PPP, PDI, maupun Golkar. Dengan keyakinan itu akhirnya anggota bisa diterima sebagai PNS.

Alasan dari IPNU-IPPNU memberikan keyakinan seperti itu, karena dulu IPNU-IPPNU dianggap sebagai penganut P3. Saat itu partai politik baru terdapat tiga partai, diantaranya:

- a. P3/PPP (Partai Persatuan Pembangunan), partai untuk orang yang bersifat agamis.
- b. PDI (Partai Demokrasi Indonesia), partai untuk orang yang bersifat nasionalis.









